

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis sekolah.

Undang – Undang Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 3 bagian c menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditunjukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Dalam pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara

efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Meningkatnya kebutuhan pada bidang pendidikan mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat SMA/SMK di Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar dua belas tahun yang bermutu.

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya – biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diterima di sekolah biasanya mengacu pada anggaran dana BOS tahun lalu yang

penggunaannya berdasarkan jumlah kuantitas siswa pada saat ini. Penggunaan dana BOS juga harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti jika terdapat selisih kelebihan dana BOS maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Munculnya kebijakan Dana BOS ini bukan berarti permasalahan di dunia pendidikan telah usai. Terdapatnya ketidaksesuaian merupakan salah satu indikator yang menimbulkan beberapa kendala pada penganggaran dana BOS di SMKN 39. Salah satunya sosialisasi dana BOS pada SMKN 39 Jakarta Pusat ini belum dilakukan dengan baik. Adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BOS dengan peraturan penggunaan dana BOS tersebut. Kurangnya koordinasi antar tim khusus dalam rangka pemberian informasi untuk mengelola anggaran dana BOS tersebut. Disamping itu, terdapat anggota tim yang kurang memahami aturan penggunaan anggaran dana tersebut yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien didalam pengaplikasian dan BOS tersebut.

Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya Renstra (Rencana Strategi) Departemen Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana BOS.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggung jawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Proses tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang (pemerintah, orang tua siswa dan guru) sesuai dengan penyusunan pelaporan yang dibuat. Selain itu, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran.

Tetapi masih ada saja komite sekolah yang beranggapan, bagaimana caranya agar dana BOS tersebut harus digunakan semua. Ini lebih menjadi tujuan utama daripada pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penulisan Karya Ilmiah, penulis melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Anggaran Dana BOS Terhadap Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 39 Jakarta Pusat.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Anggaran Dana BOS di SMKN 39 Jakarta Pusat?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala akuntabilitas anggaran operasional Dana BOS pada SMKN 39 Jakarta Pusat?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Terkait bahasan diatas, tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan anggaran Dana BOS di SMK Negeri 39 Jakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan antara anggaran dan realisasi dalam penganggaran operasional Dana BOS pada SMKN 39 Jakarta Pusat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kesalahan akuntabilitas anggaran operasional Dana BOS pada SMKN 39 Jakarta Pusat

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi Penulis
 - Sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan mengenai Penerapan Anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
 - Sebagai informasi tambahan bagi penulis mengenai akuntabilitas SMKN 39 Jakarta.
- b. Bagi SMKN 39 Jakarta Pusat
 - Sebagai informasi masukan, sumbangan pemikiran, serta data pertimbangan kepada pimpinan sekolah untuk

memperbaiki kinerjanya dalam peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- Sebagai referensi tambahan bagi kemajuan SMKN 39 dimasa mendatang
- Sebagai acuan dasar bagi SMKN 39 didalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi
- Sebagai informasi untuk dijadikan acuan dasar bagi pembuatan laporan realisasi yang ditujukan bagi Dinas Pendidikan Jakarta

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta didalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan anggaran dan pelaporan.